

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Volume 10 Nomor 2, Desember 2013

TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN PENGGUNAAN DERIVATIF KEUANGAN DALAM AKTIVITAS PENGHINDARAN PAJAK

Oktavia

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana
oktavia@ukrida.ac.id

Dwi Martani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
dwimartani@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate whether, in a case study of Indonesia, financial derivatives are used as a means of tax avoidance as literature shows that derivative users incline to avoid tax. Two samples treatment are conducted in examining the problem. Initially, using the sample all derivative users, this study does not find that derivative users are significantly related to tax avoidance. However, when the sample is separated into two groups based on the level of disclosure on financial derivatives, the results show otherwise. Firms with low level of disclosure on financial derivatives is more tax aggressive compared to those with high level of disclosure. These findings are shown by their lower ETRs (Effective Tax Rate) compared to other firms. Moreover, this study also examines the relationship between the use of financial derivatives with the level of tax avoidance. The results indicate that the use of financial derivatives is positively related to the level of tax avoidance. Results of this study are expected to have positive contribution on the development of tax policy in Indonesia, particularly for the tax on derivatives.

Keywords: *tax avoidance, financial derivatives, level of disclosure.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah derivatif keuangan digunakan sebagai sarana penghindaran pajak dalam studi kasus Indonesia karena sejumlah literatur menyatakan bahwa pengguna derivatif cenderung untuk menghindari pajak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan dua jenis perlakuan terhadap sampel penelitian. Pada awalnya, ketika menggunakan sampel semua pengguna derivatif, studi ini tidak menemukan bahwa pengguna derivatif secara signifikan berhubungan dengan penghindaran pajak. Namun, ketika sampel dipisahkan menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat pengungkapan derivatif keuangan, hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan derivatif keuangan yang rendah memiliki agresivitas pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan tingkat pengungkapan derivatif keuangan yang tinggi. Temuan ini ditunjukkan oleh rendahnya ETR (tarif pajak efektif) perusahaan tersebut apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga meneliti hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan secara positif berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya untuk pajak atas derivatif.

Kata kunci: *penghindaran pajak, derivatif keuangan, tingkat pengungkapan.*

LATAR BELAKANG

Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak PSAK No. 55 (1999) diimplementasikan (Murwaningsari 2011). Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perusahaan pengguna derivatif keuangan maupun peningkatan volume transaksi derivatif keuangan di Indonesia selama satu dekade terakhir ini. Penelitian Murwaningsari (2011) menunjukkan bahwa volume transaksi derivatif keuangan mengalami peningkatan pesat dari Rp 17.472,53 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 60.705,55 milyar pada tahun 2009.

Terkait dengan perpajakan, peraturan pajak di Indonesia atas transaksi derivatif ini masih sangat lemah dan seringkali diperdebatkan. Sebagai contoh, apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak? Menurut Darussalam dan Karyadi (2012), apabila transaksi derivatif bukan untuk tujuan lindung nilai, seharusnya kerugian dari transaksi derivatif tersebut tidak boleh diakui sebagai *deductible expense*, apalagi jika transaksi derivatif tersebut tidak memiliki *underlying assets*.

Namun, peraturan perpajakan di Indonesia tidak membedakan antara derivatif keuangan tujuan lindung nilai dengan derivatif keuangan tujuan spekulasi. Padahal, untuk menentukan apakah kerugian derivatif bersifat *deductible* atau *non-deductible*, diperlukan suatu definisi yang jelas mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif (Darussalam dan Karyadi 2012). Dalam hal pemeriksaan pajak, aparat pajak menganggap kerugian dari derivatif spekulatif sebagai *deductible expense*, padahal tidak ada aturan pajak yang jelas mengenai hal tersebut. Akibatnya, timbul sengketa antara aparat pajak dengan wajib pajak (Darussalam dan Karyadi 2012). Apabila ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif ini terus dibiarkan, sengketa antara aparat pajak dan wajib pajak tersebut tidak dapat dihindari dan sulit untuk diselesaikan.

Ketidakjelasan dari peraturan pajak atas transaksi derivatif juga dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Darussalam dan Septriadi 2009). Hal ini tentunya dapat merugikan penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menjaga penerimaan pajak dari kerugian derivatif untuk tujuan spekulasi yang tidak ada kaitannya dengan usaha, yaitu dengan cara mengadopsi peraturan pajak atas transaksi derivatif yang lebih baik dari negara lainnya (Darussalam dan Septriadi 2009).

Penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan juga erat kaitannya dengan praktik manajemen laba. Menurut Barton (2001) serta Pincus dan Rajgopal (2002), penggunaan derivatif keuangan merupakan salah satu bentuk dari praktik manajemen laba. Dengan menampilkan kinerja perusahaan yang terbaik, manajer akan dihargai oleh para pemegang saham sehingga kompensasi yang akan diterima oleh manajer tersebut meningkat (Smith dan Stulz 1985; Gaver et al. 1995; Balsam 1998; Barton 2001; Pincus dan Rajgopal 2002).

Studi mengenai penggunaan derivatif keuangan sebagai alat manajemen laba telah berkembang pesat, namun studi mengenai penggunaan derivatif sebagai alat penghindaran pajak masih sangat langka, padahal derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak (Donohoe 2012; Raskolnikov 2011). Penelitian Donohoe (2012) yang menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat merupakan salah satu studi yang menguji dan membuktikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Menurut Donohoe (2012), penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak didorong oleh ambiguitas dalam peraturan pajak atas transaksi derivatif. Ambiguitas inilah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif. Namun demikian, meskipun Donohoe (2012) berhasil membuktikan bahwa derivatif keuangan

dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, hasil penelitiannya belum tentu dapat digeneralisasi pada konteks negara lainnya yang memiliki sistem perpajakan yang berbeda, misalnya Indonesia.

Di Indonesia, belum ada satu pun penelitian yang menguji hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Padahal, di Indonesia tidak ada peraturan perpajakan yang secara spesifik mengatur mengenai perlakuan pajak atas transaksi derivatif (Darussalam dan Septriadi 2009) sehingga lebih memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan ketidakjelasan dari peraturan tersebut untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan menggunakan derivatif keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah derivatif keuangan dapat digunakan untuk memfasilitasi upaya penghindaran pajak perusahaan.

Kontribusi dari penelitian ini adalah mengembangkan penelitian sebelumnya (Donohoe 2012) dengan mengelompokkan perusahaan pengguna derivatif menjadi dua kategori, yaitu perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure level user*) dan perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*). Pengelompokkan ini perlu dilakukan karena adanya perbedaan motivasi dari kedua kategori perusahaan tersebut. Perusahaan yang menyembunyikan transaksi derivatifnya perlu lebih diperhatikan karena memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia

Pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan

perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi “sedikit lebih jelas” dengan dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, dikenai PPh final sebesar 2,5% dari margin awal.

Penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (Agustian 2009). Sebagai bentuk penolakan terhadap PP Nomor 17 Tahun 2009, mereka mengajukan uji material ke Mahkamah Agung terkait dengan PP tersebut. Menurut Agustian (2009), alasan penolakan terhadap PP Nomor 17 Tahun 2009 tersebut antara lain:

- PP ini dianggap sangat merugikan karena membebankan Pajak Penghasilan yang sangat besar, yaitu 2,5 % dari margin awal.
- Dasar pengenaan Pajak Penghasilan dari margin awal adalah tidak tepat secara hukum, karena margin hanyalah jaminan untuk bertransaksi dan bukan merupakan obyek dari pajak penghasilan.
- Pembebanan tarif PPh final sebesar 2,5% dari margin awal sangat diskriminatif dan berpotensi mematikan industri berjangka di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pengajuan uji material ini, Mahkamah Agung kemudian memberikan putusan nomor 22 P/HUM/2009 yang menyatakan mengabulkan hak uji materiil pemohon, sehingga diterbitkanlah PP Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2009 dicabut dan

tidak berlaku lagi (Agustian 2009). Dengan demikian, sampai detik ini kepastian hukum perpajakan atas transaksi derivatif masih belum jelas, terlebih lagi untuk transaksi derivatif tanpa melalui bursa (*over the counter/ OTC*) yang justru lebih banyak dilakukan oleh perusahaan. Padahal, transaksi derivatif OTC ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan transaksi derivatif yang melalui bursa karena transaksi derivatif OTC ini cenderung disembunyikan oleh perusahaan (*off-balance sheet*) (Murwaningsari 2011).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menurut Donohoe (2012), terdapat beberapa alasan mengapa derivatif dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak, yaitu: (1) karakteristik fundamental dari derivatif; (2) sifat dari transaksi derivatif; (3) lemahnya sistem perpajakan atas transaksi derivatif; serta (4) aspek kognitif dari transaksi derivatif tersebut (rumit dan sulit dipahami). Terkait dengan alasan-alasan tersebut, sesuai dengan konteks sistem perpajakan yang ada di Indonesia, penelitian ini menekankan pada aspek sistem perpajakan atas transaksi derivatif yang lemah sebagai penyebab mengapa derivatif keuangan dapat digunakan sebagai alat penghindaran pajak.

Sistem perpajakan yang lemah atas transaksi derivatif meliputi inkonsistensi, asimetri, dan ketidakpastian dalam sistem pelaporan pajak (Weisbach 2005). Inkonsistensi timbul karena ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan pajak atas transaksi derivatif ini sehingga menimbulkan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang agresif (Donohoe 2012). Perlakuan asimetri timbul karena adanya perbedaan perlakuan pajak untuk transaksi derivatif yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda, misalnya tujuan lindung nilai versus tujuan spekulasi. Terakhir adalah masalah ketidakpastian hukum dari aturan pajak atas transaksi derivatif yang memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian tentang dampak penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas

penghindaran pajak pertama kali dilakukan oleh Donohoe (2011a, 2011b, 2012). Dalam pengujian penelitiannya, Donohoe (2012) menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat. Menurut Donohoe (2012), peraturan pajak atas transaksi derivatif di Amerika Serikat masih bersifat ambigu sehingga memotivasi perusahaan untuk memanfaatkan ambiguitas tersebut untuk menghindari pajak dengan menggunakan derivatif keuangan (Donohoe 2011a, 2011b, 2012). Studi yang dilakukan oleh Donohoe (2012) tersebut berhasil menemukan bukti empiris bahwa derivatif dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak. Meskipun peraturan pajak atas transaksi derivatif di Amerika Serikat masih bersifat ambigu, namun setidaknya negara Amerika Serikat memiliki peraturan pajak yang mengatur tentang perlakuan pajak atas transaksi derivatif. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia yang tidak memiliki peraturan mengenai perlakuan pajak atas transaksi derivatif.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Donohoe (2012) dengan cara menguji kembali dampak penggunaan derivatif keuangan terhadap aktivitas penghindaran pajak untuk konteks Indonesia dan dengan mempertimbangkan tingkat pengungkapan dari transaksi derivatif dalam melakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini mengelompokkan perusahaan pengguna derivatif menjadi dua kategori, yaitu pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure level user*) dan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*).

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan temuan penelitian Donohoe (2012), maka penelitian ini akan menguji apakah derivatif keuangan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai alat penghindaran pajak. Adanya ketidakjelasan definisi spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif dapat dimanfaatkan

perusahaan untuk menggunakan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak. Menurut Darussalam dan Karyadi (2012), definisi ini tidak ditemukan dalam peraturan perpajakan di Indonesia, meskipun dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a dalam UU PPh telah disebutkan bahwa: "Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak". Padahal, untuk menentukan apakah suatu rugi derivatif itu bersifat *deductible* atau *non-deductible*, diperlukan suatu definisi yang jelas dalam aturan perpajakan mengenai spekulatif atau tidaknya suatu transaksi derivatif. Oleh karena itu, sama halnya dengan Donohoe (2012), penelitian ini menduga bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan (*matched sample*).

Jika dikaitkan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif, ada perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan transaksi derivatifnya (*off-balance sheet*) dan ada pula perusahaan pengguna derivatif yang dengan eksplisit mengungkapkan transaksi derivatifnya secara lengkap dan jelas. Donohoe (2011b) berargumen bahwa meningkatnya penggunaan transaksi *off-balance sheet* dapat menurunkan beban pajak (*tax burden*) perusahaan. Namun, studinya belum menguji dampak dari transaksi *off-balance sheet* ini. Oleh karena itu, timbul dugaan bahwa perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan informasi transaksi derivatif memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih

agresif daripada perusahaan yang secara eksplisit mengungkapkan informasi transaksi derivatifnya.

Adanya perbedaan tingkat pengungkapan transaksi derivatif oleh perusahaan pengguna derivatif membuat penelitian ini mengelompokkan perusahaan pengguna derivatif menjadi dua kategori, yaitu perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure level user*) dan perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*). Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan hipotesis penelitian berikut ini.

H₂: Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang rendah (*low disclosure level user*) lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*).

High disclosure level user pada penelitian ini adalah perusahaan yang menggunakan derivatif keuangan dan mengungkapkan nilai wajar, jumlah nosional, maupun keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif yang dilakukan pada catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 55, revisi 2011). *Low disclosure level user (off-balance sheet)* pada penelitian ini adalah perusahaan yang tidak mengungkapkan atau hanya mengungkapkan salah satu dari ketiga komponen nilai yang berkaitan dengan transaksi derivatifnya, yaitu: (i) nilai wajar atas transaksi derivatif; (ii) jumlah nosional derivatif; dan (iii) keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif yang dilakukannya.

Hipotesis kesatu dan kedua pada penelitian ini hanya berfokus pada perbedaan tingkat penghindaran pajak antara: (i) pengguna derivatif dan bukan pengguna derivatif; dan (ii) *low disclosure level user* dan *high disclosure level user*. Level atau tingkat penggunaan derivatif keuangan, yang diukur dengan menggunakan angka akuntansi, belum

disinggung oleh kedua hipotesis tersebut. Oleh karena itu, perlu diuji lebih lanjut mengenai hubungan antara tingkat penghindaran pajak dengan tingkat penggunaan derivatif keuangan. Penelitian ini menggunakan *net fair value of derivative instrument* sebagai proksi penggunaan derivatif keuangan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Tingkat penggunaan derivatif keuangan berhubungan positif dengan tingkat penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Hipotesis H₁ pada penelitian ini diuji menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$TAXVAR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 USER_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_4 ROA_{it} + \alpha_5 LEV_{it} + \alpha_6 CAPINT_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- TAXVAR = Penghindaran pajak
- USER = *Dummy* pengguna, 1 untuk *derivative user* dan 0 untuk *matched sample*
- SIZE = Logaritma natural dari total aset
- ROA = Rasio laba terhadap total aset
- LEV = Rasio total liabilitas terhadap total aset
- CAPINT = Rasio *net property, plants, and equipment* terhadap total aset tahun t-1

Sebelum melakukan pengujian hipotesis H₂, penelitian ini terlebih dahulu akan menguji kembali Model 1 di atas dengan mengganti variabel USER menjadi dua variabel *dummy*, yaitu (1) *LOWDISCLOSE* yang diberi nilai 1 untuk *low disclosure level user* dan 0 untuk lainnya; (2) *HIGHDISCLOSE* yang diberi nilai 1 untuk *high disclosure level user* dan 0 untuk lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan seluruh sampel pada penelitian ini (pengguna derivatif maupun bukan pengguna derivatif) untuk menguji

perbedaan rata-rata tingkat penghindaran pajak antara perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *high disclosure level user* dengan perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *low disclosure level user* maupun dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif (*matched sample*).

Setelah pengujian tersebut di atas dilakukan, maka selanjutnya hipotesis H₂ pada penelitian ini diuji dengan menggunakan Model 2. Dalam menguji Model 2, tidak seluruh sampel perusahaan digunakan, tetapi hanya sampel perusahaan pengguna derivatif keuangan saja.

$$TAXVAR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DISCLOSE_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_4 ROA_{it} + \alpha_5 LEV_{it} + \alpha_6 CAPINT_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- TAXVAR = Penghindaran pajak
- DISCLOSE = *Dummy* pengungkapan, 1 untuk *low disclosure level user* dan 0 untuk *high disclosure level user*
- SIZE = Logaritma natural dari total aset
- ROA = Rasio laba terhadap total aset
- LEV = Rasio total liabilitas terhadap total aset
- CAPINT = Rasio *net property, plants, and equipment* terhadap total aset pada t-1

Terakhir, untuk menguji hipotesis H₃ pada penelitian digunakan Model 3. Model 3 diuji dengan hanya menggunakan sampel pengguna derivatif keuangan yang melaporkan aset dan liabilitas derivatif dalam laporan keuangannya.

$$TAXVAR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FVDER_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_4 ROA_{it} + \alpha_5 LEV_{it} + \alpha_6 CAPINT_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

- TAXVAR = Penghindaran pajak
- FVDER = *Net fair value of derivative*
- SIZE = Logaritma natural dari total aset

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Uraian
1	Penghindaran Pajak (TAXVAR)	Untuk menguji hipotesis H ₁ dan H ₂ , variabel ini diukur dengan menggunakan tiga ukuran, yaitu GETR (GAAP ETR), CETR (Current ETR), dan ETR_DIFF (ETR <i>differential</i>). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), ketiga ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi dari penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan. GETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap <i>pre-tax income</i> . Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. <i>Pre-tax income</i> adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. CETR dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap <i>pre-tax income</i> . Beban pajak penghasilan kini adalah beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. ETR_DIFF merupakan selisih antara tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia (28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010-2012) dengan GAAP ETR. Sedangkan untuk menguji hipotesis H ₃ digunakan dua ukuran penghindaran pajak, yaitu: ABS_BTD dan ABS_ETRDIF. ABS_BTD adalah nilai absolut dari <i>book-tax difference</i> (selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal), dan ABS_ETRDIF adalah nilai absolut dari ETR <i>differential</i> . Alasan digunakannya kedua ukuran ini adalah karena dalam menguji hipotesis H ₃ , tingkat penggunaan derivatif keuangan diukur menggunakan <i>net fair value of derivative instrument</i> yang merupakan selisih antara aset derivatif dan liabilitas derivatif. Ukuran ini sama seperti yang digunakan dalam penelitian Donohoe (2012). Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat penghindaran pajak juga digunakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal.
2	Pengguna Derivatif Keuangan (USER)	Variabel ini merupakan variabel <i>dummy</i> yang diberi nilai 1 untuk perusahaan pengguna derivatif keuangan dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan derivatif
3	Tingkat Pengungkapan dari Transaksi Derivatif (DISCLOSE)	Variabel DISCLOSE ini merupakan variabel <i>dummy</i> yang diberi nilai 1 untuk perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan <i>low disclosure level user (off-balance-sheet)</i> , dan nilai 0 untuk perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai <i>high disclosure level user</i> .
4	Penggunaan Derivatif Keuangan (Fair Value of Derivative Instrument / FVDER)	Variabel ini digunakan pada penelitian Donohoe (2012) untuk mengukur penggunaan derivatif pada penelitian Donohoe (2012) ketika menguji hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Sama seperti Donohoe (2012), penelitian ini mengukur penggunaan derivatif keuangan dengan menggunakan nilai absolut dari <i>net fair value of derivative instrument</i> . Berikut ini rasio yang digunakan untuk mengukur variabel penggunaan derivatif keuangan (Donohoe 2012): $\text{FVDER} = \frac{\text{Nilai Absolut dari fair value of derivative instrument}}{\text{Total aset tahun t-1}}$
5	Ukuran Perusahaan (SIZE)	Variabel ini diukur dengan menggunakan logaritma natural aset. Sejalan dengan <i>political cost hypothesis</i> yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986), beberapa peneliti berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung menghindari kenaikan laba yang terlalu drastis karena dapat menyebabkan bertambahnya beban pajak perusahaan (Healy 1985; Moses 1987; Ashari et al. 1994; Scott 2009).
6	Return on Asset (ROA)	Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio <i>Return on Asset</i> (ROA) yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Derashid dan Zhang 2003): $\text{ROA} = \frac{\text{Income before tax}}{\text{Total aset}}$

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan. ETR merupakan salah satu ukuran yang seringkali digunakan untuk mengukur penghindaran pajak/perencanaan pajak.

Sebaliknya, Derashid dan Zhang (2003) menemukan bahwa profitabilitas berhubungan negatif signifikan dengan ETR. Temuan Derashid dan Zhang (2003) ini menunjukkan bahwa semakin besar profit yang diperoleh oleh perusahaan, justru semakin rendah ETR perusahaan tersebut.

- 7 **Leverage (LEV)** Variabel *leverage* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio berikut (Derashid dan Zhang 2003):

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$$

Menurut Gupta dan Newberry (1997), keputusan pendanaan memiliki dampak terhadap ETR (*effective tax rate*) perusahaan. Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang boleh menjadi pengurang pajak penghasilan, tetapi dividen tidak. Oleh karena itu, utang dianggap dapat mengurangi ETR perusahaan (Gupta dan Newberry 1997; Derashid dan Zhang 2003). Konsisten dengan hal tersebut, banyak studi telah menemukan hubungan negatif dan signifikan antara tingkat utang dan ETR (Gupta dan Newberry 1997; Derashid dan Zhang 2003).

- 8 **Capital Intensity (CAPINT)** Variabel ini diadopsi dari penelitian Derashid dan Zhang (2003). Berikut ini rumus untuk menghitung *capital intensity* dalam penelitian ini (Derashid dan Zhang 2003):

$$\text{CAPINT} = \frac{\text{Net property, plants, and equipment}}{\text{Total aset tahun } t-1}$$

Variabel ini banyak digunakan sebagai variabel kontrol dalam studi-studi mengenai determinan penghindaran pajak (Derashid dan Zhang 2003; Gupta dan Newberry 1997).

ROA	= Rasio laba terhadap total aset
LEV	= Rasio total liabilitas terhadap total aset
CAPINT	= Rasio <i>net property, plants, and equipment</i> terhadap total aset pada t_{-1}

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Data dan Sampel

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pada penelitian ini meliputi periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Periode ini dipilih karena tahun 2009 merupakan tahun awal diefektifkannya tarif pajak penghasilan badan tunggal di Indonesia. Periode sebelum tahun 2009 tidak diobservasi dalam penelitian ini untuk menghindari bias yang disebabkan adanya perbedaan tarif pajak penghasilan pada

periode tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan publik nonkeuangan di Indonesia. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu:

- Perusahaan bergerak di sektor industri nonkeuangan. Perusahaan ini dipilih karena sifat praktik akuntansi industri spesifik dan fungsi penggunaan derivatif keuangannya berbeda dengan industri keuangan sehubungan dengan adanya regulasi khusus untuk industri keuangan.
- Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, perusahaan tidak pernah mengalami kerugian. Perusahaan ini dikeluarkan karena dapat mengakibatkan kerancuan pada hasil penelitian. Sebagai contoh, *effective tax rate* (ETR) dari perusahaan ini lebih rendah bukan karena dampak dari penggunaan derivatif keuangan, tetapi memang karena kerugian finansial perusahaan.
- Perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif nilai tukar mata uang asing dan suku bunga dari tahun 2009

- sampai dengan tahun 2012 merupakan sampel utama pada penelitian ini. Kata kunci untuk menentukan apakah perusahaan terindikasi menggunakan derivatif atau tidak, disajikan pada Lampiran 1.
- d. Perusahaan yang tidak terindikasi melakukan transaksi derivatif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 akan digunakan sebagai *matched sample*.
 - e. Mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tahapan pemilihan sampel utama pada penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2. Proses pengeluan *outlier* dilakukan dengan mengeluarkan 7 observasi, yaitu 2 observasi yang memiliki nilai *Current ETR (Effective Tax Rate)* tertinggi dan terendah; 2 observasi yang memiliki nilai GAAP ETR tertinggi dan terendah; 2 observasi yang memiliki nilai *BTD (Book-Tax Difference)* tertinggi dan terendah; dan 1 observasi yang memiliki nilai *ETR differential* tertinggi (observasi ini juga memiliki nilai GAAP ETR yang cukup ekstrim yaitu -2.8646). Selanjutnya, sampel utama tersebut akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sampel *low disclosure level user (off-balance sheet)* dan sampel *high disclosure level user*. Perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif serta mengungkapkan nilai wajar, jumlah nosional, maupun keuntungan/kerugian dari transaksi derivatif yang dilakukannya pada catatan atas laporan keuangannya dikategorikan sebagai *high disclosure level user*. Pengungkapan tersebut didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, khususnya PSAK 55 (revisi 2011). Selanjutnya, perusahaan dikategorikan sebagai sampel *low disclosure level user* jika perusahaan tidak mengungkapkan atau hanya mengungkapkan salah satu dari ketiga komponen nilai yang berkaitan dengan transaksi derivatifnya, yaitu: (i) nilai wajar atas transaksi derivatif; (ii) jumlah nosional derivatif; dan (iii) keuntungan/kerugian atas transaksi derivatif yang dilakukannya.

Tabel 2
Prosedur Pemilihan Sampel Utama

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2012	466
Dikurangi: Jumlah perusahaan publik yang bergerak di sektor keuangan	(72)
Jumlah perusahaan publik yang bergerak di sektor non keuangan	394
Dikurangi: Jumlah perusahaan yang tidak terindikasi melakukan transaksi derivatif	(337)
Jumlah perusahaan yang terindikasi melakukan transaksi derivatif	57
Dikurangi: Jumlah perusahaan terindikasi melakukan transaksi derivatif namun mengalami kerugian pada rentang waktu 2009 – 2012	(14)
Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel utama	43
Jumlah observasi selama 4 tahun (2009 – 2012): 43 x 4	172
Dikurangi: Data tidak lengkap	(13)
Dikurangi: <i>Outlier</i>	(7)
Jumlah observasi sampel utama	152
Sampel <i>low disclosure level user</i> = 73 observasi Sampel <i>high disclosure level user</i> = 79 observasi 152 observasi	

Tabel 2 menunjukkan bahwa sampel utama pada penelitian ini berjumlah 153 observasi. Dari 152 observasi tersebut, sebanyak 73 observasi merupakan *low disclosure level user* dan 79 observasi merupakan *high disclosure level user*. Selanjutnya, pada Tabel 3 disajikan pula dekripsi dari prosedur pemilihan *matched sample* pada penelitian ini. *Matched sample* merupakan perusahaan yang berada dalam sektor industri yang sama dengan sampel utama. Dari Tabel 3 tersebut, diketahui bahwa *matched sample* final yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 144 observasi.

Tabel 3
Prosedur Pemilihan *Matched Sample*

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai <i>matched sampel</i> (jumlahnya sama dengan sampel utama sebelum perusahaan yang tidak ditemukan laporan keuangannya dan <i>outlier</i> dikeluarkan)	43
Jumlah observasi selama 4 tahun (2009 – 2012): 43 x 4	172
Dikurangi: Data tidak lengkap	(7)
Dikurangi: <i>Outlier</i>	(21)
Jumlah observasi <i>matched sample</i>	144

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik

Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif dari data penelitian. Panel A di Tabel 4 menunjukkan statistik deskriptif dari data seluruh perusahaan pengguna derivatif, sedangkan Panel A1 dan Panel A2 menunjukkan statistik deskriptif dari data pengguna derivatif setelah dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *high disclosure level user* dan *low disclosure level user*. Diketahui bahwa rata-rata GETR dan CETR dari *low disclosure level user* lebih rendah dibandingkan rata-rata GETR dan CETR dari *high disclosure level user*. Di samping itu, terlihat pula bahwa rata-rata ETR_DIFF (ETR *differential*) dari perusahaan pengguna derivatif yang dikategorikan sebagai *low disclosure level user* lebih besar daripada *high disclosure level user*.

Apabila rata-rata GETR, CETR, maupun ETR_DIFF dari *low disclosure level user* dibandingkan dengan rata-rata GETR, CETR, maupun ETR_DIFF dari *matched sample* (Panel C Tabel 4), terlihat bahwa rata-rata tingkat penghindaran pajak dari *low disclosure level user* lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif (*matched sample*).

Uji Asumsi Regresi

Uji asumsi regresi pada penelitian ini diawali dengan melakukan uji multikolinearitas untuk masing-masing model regresi. Hasil uji multikolinearitas untuk masing-masing model ditampilkan pada Tabel 5. Dari Tabel 5 diketahui bahwa semua nilai toleransi adalah lebih besar dari 0.1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas pada model yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah autokorelasi, penelitian ini menggunakan metode GLS (*General Least Square*) dengan pertimbangan bahwa metode GLS ini juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Dalam mengatasi masalah autokorelasi, digunakan varian GLS dengan pembobotan *cross-section* (*cross-section weights*) serta model koefisien kovarians *cross-weights Panel Corrected Standard Error* (PCSE). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi maupun heteroskedastisitas untuk semua hasil estimasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Semua model dalam penelitian ini diestimasi dengan menggunakan metode *common effect*. Sebelum memilih model *common effect*, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji F untuk mengetahui apakah analisis regresi data panel yang menggunakan *fixed effect* lebih baik daripada model regresi *common effect*. Karena nilai statistik F hitung lebih kecil daripada F tabel untuk tingkat signifikansi tertentu, maka hipotesis *null* (yang menyatakan bahwa metode *common effect* lebih baik) tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *common effect* lebih baik untuk digunakan dalam mengestimasi hasil pengujian hipotesis. Oleh karena itu, untuk mengestimasi hasil pengujian hipotesis H_1 dan H_2 pada penelitian ini digunakan metode *common effect*.

Tabel 4
Statistik Deskriptif

Panel A. Perusahaan pengguna derivatif (n = 153)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.2870	0.2547	1.8665	-0.5190	0.1923
CETR	0.2924	0.2467	1.8648	0.0100	0.2180
ETR_DIFF	-0.0295	-0.0021	0.7690	-1.6165	0.1920
SIZE	15.9509	16.0039	19.0210	13.1036	1.3280
ROA	0.1081	0.0812	0.4172	-0.0044	0.0987
DTA	0.5008	0.5020	0.8940	0.1374	0.1573
CAPINT	0.3861	0.3483	0.9510	0.0464	0.2253
Panel A1. Perusahaan penggunaan derivatif - high disclosure level user (n = 79)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.3176	0.2543	1.8665	0.1212	0.2291
CETR	0.3228	0.2434	1.8648	0.0100	0.2769
ETR_DIFF	-0.0592	-0.0017	0.1492	-1.6165	0.2298
SIZE	15.9280	15.5357	19.0210	13.5604	1.4572
ROA	0.1127	0.0855	0.4066	-0.0044	0.1046
DTA	0.5696	0.5701	0.8940	0.1374	0.1481
CAPINT	0.4080	0.3698	0.9510	0.0464	0.2264
Panel A2. Perusahaan penggunaan derivatif low disclosure level user (n = 73)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.2539	0.2581	0.6442	-0.5190	0.1361
CETR	0.2595	0.2468	0.7982	0.0695	0.1203
ETR_DIFF	0.0026	-0.0051	0.7690	-0.3942	0.1346
SIZE	15.9758	16.1726	18.5284	13.1036	1.1820
ROA	0.1032	0.0771	0.4172	0.0075	0.0924
DTA	0.4264	0.4351	0.7115	0.1746	0.1315
CAPINT	0.3623	0.3047	0.8775	0.0596	0.2233
Panel C. Matched sample (n = 144)					
Variabel	Mean	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev
GETR	0.2911	0.2576	1.4566	0.0953	0.1669
CETR	0.2704	0.2570	1.1761	0.0013	0.1292
ETR_DIFF	-0.0338	-0.0005	0.1547	-1.2066	0.1663
SIZE	14.6884	14.8749	17.5414	11.1571	1.3858
ROA	0.1036	0.0914	0.4662	-0.0018	0.0824
DTA	0.4482	0.4440	0.8660	0.0050	0.2023
CAPINT	0.4961	0.3840	1.2769	0.0365	0.6283

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model (1)			Model (2)			Model (3)		
Variabel Dependen: GETR; CETR; ETR_DIFF			Variabel Dependen: GETR; CETR; ETR_DIFF			Variabel Dependen: ABS_BTD dan ABS_ETRDIF		
Variable	Tolerance	VIF	Variable	Tolerance	VIF	Variable	Tolerance	VIF
USER	0.7900	1.2660	DISCLOSE	0.7820	1.2780	FVDER	0.9070	1.1020
SIZE	0.8140	1.2290	SIZE	0.9690	1.0320	SIZE	0.9540	1.0480
ROA	0.9020	1.1090	ROA	0.9560	1.0460	ROA	0.9560	1.0450
LEV	0.8670	1.1540	LEV	0.7690	1.3000	LEV	0.9170	1.0900
CAPINT	0.9500	1.0530	CAPINT	0.9650	1.0360	CAPINT	0.9890	1.0120

Penelitian ini tidak menguji apakah metode *random effect* lebih baik daripada metode *fixed effect* atau *common effect* karena dalam proses pengolahan data panel dengan menggunakan Eviews 6, hasil estimasi yang menggunakan metode *random effect* tidak dapat ditampilkan/tidak keluar outputnya.

Pengujian Hipotesis H_1

Hipotesis H_1 pada penelitian ini menyatakan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan. Hasil pengujian hipotesis H_1 disajikan di Tabel 6. Pada Tabel 6, ditunjukkan bahwa ketika tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan GETR dan ETR_DIFF, variabel USER menjadi tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih besar dari α (0.1). Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak antara perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 pada penelitian ini tidak terbukti.

Dari Tabel 6, dapat dilihat pula bahwa ketika tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan CETR, koefisien dari variabel USER adalah positif dan signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan pengguna derivatif keuangan memiliki tarif pajak efektif kini yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan. Dengan kata lain, tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif lebih rendah daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan (*matched sample*). Temuan ini bertentangan dengan hipotesis H_1 yang menyatakan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan. Hasil yang bertentangan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan dari transaksi derivatif. Pada penelitian ini, sampel pengguna derivatif keuangan lebih banyak didominasi oleh pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*). Selain itu, *high disclosure level user* ini juga memiliki rata-rata nilai CETR dan GETR yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan lainnya.

Perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*), lebih transparan dalam mengungkapkan transaksi derivatif yang dilakukannya. Menurut Lobo dan Zhou (2001), semakin transparan pengungkapan pelaporan keuangan, maka semakin rendah tingkat manajemen laba yang bersifat

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis H_1

Variabel	Variabel Dependen: CETR			Variabel Dependen: GETR			Variabel Dependen: ETR_DIFF		
	Coeff.	t-stat	Prob.	Coeff.	t-stat	Prob.	Coeff.	t-stat	Prob.
USER	0.039181	1.702140	0.0449**	0.021236	0.941918	0.1735	-0.020016	-0.887940	0.1877
SIZE	-0.008003	-1.052951	0.1466	-0.019037	-2.557336	0.0055***	0.017834	2.396019	0.0086***
ROA	-0.474121	-3.999320	0.0000***	-0.424861	-3.659058	0.0002***	0.417960	3.600036	0.0002***
DTA	-0.071236	-1.180272	0.1195	0.078723	1.331723	0.0920*	-0.073571	-1.244702	0.1071
CAPINT	0.010431	0.465507	0.3210	0.031627	1.441029	0.0754	-0.034063	-1.552211	0.0609*
C	0.463773	4.026840	0.0000***	0.563738	4.997598	0.0000***	-0.289164	-2.563766	0.0055***
	Adjusted R-squared	0.046665		Adjusted R-squared	0.082756		Adjusted R-squared	0.078605	
	F-statistic	3.888033		F-statistic	6.323113		F-statistic		
	Prob. (F-stat)	0.0020***		Prob. (F-stat)	0.0000***		Prob. (F-stat)	0.0000***	

*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$

**) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

***) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

oportunis. Sejalan dengan argumen tersebut, penelitian ini menduga bahwa semakin transparan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan yang tidak transparan dalam mengungkapkan transaksi derivatifnya kemungkinan besar melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang lebih transparan dalam mengungkapkan transaksi derivatifnya.

Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak antara *low disclosure level user* dengan *high disclosure level user* maupun *matched sample*, maka selanjutnya Model 1 pada penelitian ini akan di-*run* ulang dengan menggunakan seluruh sampel (meliputi *derivative user* dan *matched sample*) dan mengganti variabel USER menjadi dua variabel *dummy*, yaitu (1) LOWDISCLOSE yang diberi nilai 1 untuk *low disclosure level user* dan 0 untuk lainnya; (2) HIGHDISCLOSE yang diberi nilai 1 untuk *high disclosure level user* dan 0 untuk lainnya. Tabel 7 menyajikan hasil pengujian tersebut.

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high*

disclosure level user), secara signifikan lebih rendah daripada perusahaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari: (i) Nilai koefisien variabel *dummy* HIGHDISCLOSE yang positif dan signifikan ketika tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan CETR dan GETR; (ii) Nilai koefisien variabel *dummy* HIGHDISCLOSE yang negatif dan signifikan ketika tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR *differential*. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa semakin transparan pengungkapan dari transaksi derivatif, maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Lebih lanjut, dari Tabel 7 ditunjukkan pula bahwa koefisien dari LOWDISCLOSE tidak ada yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, tingkat penghindaran pajak dari *low disclosure level user* tidak lebih tinggi daripada perusahaan lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 pada penelitian ini tidak terbukti, karena: (i) pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*) ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang justru lebih rendah daripada perusahaan yang tidak menggunakan derivatif; (ii) pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah

Tabel 7
Hasil Pengujian Ulang dari Model 1 dengan
Mengganti Variabel USER menjadi 2 Variabel Dummy
(LOWDISCLOSE dan HIGHDISCLOSE)

Variabel	Variabel Dependen: CETR			Variabel Dependen: GETR			Variabel Dependen: ETR_DIFF		
	Coeff.	t-stat	Prob.	Coeff.	t-stat	Prob.	Coeff.	t-stat	Prob.
LOWDISC	-0.007286	-0.273988	0.7843	-0.010910	-0.416200	0.6776	0.011511	0.439016	0.6610
HIGHDISC	0.078150	2.954071	0.0034***	0.048981	1.878127	0.0614*	-0.046899	-1.797875	0.0732*
SIZE	-0.006476	-0.870295	0.3849	-0.018045	-2.459956	0.0145**	0.016846	2.295886	0.0224**
ROA	-0.519571	-4.393178	0.0000***	-0.456752	-3.917621	0.0001***	0.449036	3.850501	0.0001***
DTA	-0.123974	-1.981625	0.0485**	0.041500	0.672887	0.5016	-0.037321	-0.604986	0.5457
CAPINT	0.010347	0.467548	0.6405	0.031630	1.449819	0.1482	-0.034042	-1.559997	0.1199
C	0.470803	4.166927	0.0000***	0.569789	5.115622	0.0000***	-0.294821	-2.646287	0.0086***
	Adjusted R-squared	0.068636		Adjusted R-squared	0.092195		Adjusted R-squared	0.087432	
	F-statistic	4.623316		F-statistic	5.993278		F-statistic	5.710601	
	Prob. (F-stat)	0.0002***		Prob. (F-stat)	0.0000***		Prob. (F-stat)	0.0000***	

*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$

**) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

***) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang tidak berbeda dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan.

Pengujian Hipotesis H₂

Selanjutnya penelitian ini menguji apakah tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang rendah (*low disclosure level user*), lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*). Untuk keperluan pengujian ini, sampel yang digunakan hanya perusahaan pengguna derivatif keuangan saja. Hasil pengujian hipotesis H₂ pada penelitian ini disajikan pada Tabel 8.

Dari Tabel 8, diketahui bahwa ketika tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Current ETR* dan *GAAP ETR*, koefisien dari variabel *DISCLOSE* bernilai negatif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata *GAAP ETR* dan *Current ETR* dari perusahaan pengguna derivatif dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure level user*), secara signifikan lebih rendah daripada perusahaan dengan tingkat

pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*).

Di samping itu, terlihat pula dari Tabel 8 bahwa ketika tingkat penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *ETR differential*, koefisien dari variabel *DISCLOSE* bernilai positif dan signifikan. Hasil pengujian hipotesis H₂ yang ditunjukkan pada Tabel 8 konsisten dengan temuan yang ditunjukkan pada Tabel 7. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang cenderung menyembunyikan transaksi derivatifnya (tidak transparan) memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan yang lebih transparan dalam mengungkapkan transaksi derivatifnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H₂ pada penelitian ini terbukti.

Pengujian Hipotesis H₃

Hipotesis H₃ dalam penelitian ini tidak diuji secara bersamaan dengan hipotesis H₂, dimana *FVDER* dan *DISCLOSURE* muncul dalam dalam satu regresi yang sama. Hal ini karena sampel perusahaan yang melaporkan aset dan liabilitas derivatifnya sangat sedikit (hanya 79 perusahaan saja). Apabila *FVDER* dan *DISCLOSURE* di-*run* dalam satu regresi yang sama, maka model

Tabel 8
Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Variabel	Variabel Dependen: CETR			Variabel Dependen: GETR			Variabel Dependen: ETR_DIFF		
	Coefficient	t-stat	Prob.	Coefficient	t-stat	Prob.	Coefficient	t-stat	Prob.
DISCLOSE	-0.110380	-2.914360	0.0020***	-0.085864	-2.489677	0.0069***	0.085882	2.490756	0.0070***
SIZE	-0.005533	-0.433522	0.3327	-0.004891	-0.420851	0.3373	0.003784	0.325675	0.3726
ROA	-0.561425	-3.251234	0.0007***	-0.426288	-2.711049	0.0038***	0.425895	2.709152	0.0038***
DTA	-0.236435	-1.944337	0.0269**	-0.109126	-0.985520	0.1630	0.121981	1.101863	0.1362
CAPINT	-0.177783	-2.357348	0.0098***	-0.061481	-0.895266	0.1860	0.059431	0.865616	0.1941
C	0.681408	3.266184	0.0007***	0.530754	2.793860	0.0030***	-0.261210	-1.37530	0.0855*
	Adjusted R-squared	0.114222		Adjusted R-squared	0.055854		Adjusted R-squared	0.054010	
	F-statistic	4.894311		F-statistic	2.786565		F-statistic	2.724215	
	Prob (F-stat)	0.0004***		Prob (F-stat)	0.0196**		Prob (F-stat)	0.0219**	

*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$

**) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

***) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

penelitian terkena masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, dilakukan pengujian terpisah dengan menggunakan Model 3 untuk menguji hipotesis H_3 pada penelitian ini.

Hasil dari pengujian hipotesis ini disajikan pada Tabel 9. Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel FVDER memiliki koefisien yang positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan derivatif keuangan yang diindikasikan dengan semakin besarnya koefisien FVDER, maka semakin besar pula perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Dengan demikian, hipotesis H_3 pada penelitian ini terbukti.

Analisis Sensitivitas

Untuk menguji sensitivitas dari hasil pengujian Model 1 dan Model 2, maka dilakukan pengujian tambahan dengan mengeluarkan observasi yang memiliki: (i) nilai CETR dan GETR kurang dari 0 dan lebih dari 1; dan (ii) nilai ETR *differential* lebih dari 1. Hasil pengujian sensitivitas untuk hipotesis H_1 dan H_2 konsisten dengan hasil pengujian utama atas hipotesis H_1 dan H_2 . Hasil ini semakin memperkuat hasil pengujian utama yang menyatakan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan

derivatif yang rendah (*low disclosure level user*), lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*).

Selain itu, dilakukan pula pengujian sensitivitas dari hasil pengujian tambahan (pengujian yang menguji Model 1 namun mengganti variabel USER menjadi dua variabel *dummy*, yaitu: LOWDISCLOSE dan HIGHDISCLOSE) dengan mengeluarkan observasi yang memiliki: (i) nilai CETR dan GETR kurang dari 0 dan lebih dari 1; dan (ii) nilai ETR *differential* lebih dari 1. Hasil pengujian sensitivitasnya konsisten dengan hasil pengujian tambahan yang menemukan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*) lebih rendah daripada perusahaan lainnya.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan derivatif keuangan berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Ketika pengujian dilakukan dengan membandingkan antara

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis H_3

Dependent Variable: ABS_BT D				Dependent Variable: ABS_ETRDIFF			
Variabel	Coefficient	t-Stat	Prob.	Variabel	Coefficient	t-Stat	Prob.
FVDER	0.4847	1.9026	0.0299**	FVDER	1.7516	2.0397	0.0219**
SIZE	0.0081	3.0287	0.0016***	SIZE	-0.0014	-0.1248	0.4505
ROA	-0.0499	-1.3477	0.0904*	ROA	-0.6771	-2.9003	0.0023***
DTA	-0.0104	-0.4507	0.3266	DTA	-0.2766	-1.2710	0.1033
CAPINT	-0.0240	-1.5485	0.0623*	CAPINT	-0.1314	-2.2776	0.0124**
C	-0.0771	-1.7519	0.0414**	C	0.3787	1.2172	0.1132
Adjusted R-squared	0.1098			Adjusted R-squared	0.1552		
F-statistic	3.6882			F-statistic	5.0038		
Prob (F-statistic)	0.0041***			Prob (F-statistic)	0.0004***		

*) Signifikan pada tingkat $\alpha = 10\%$

**) Signifikan pada tingkat $\alpha = 5\%$

***) Signifikan pada tingkat $\alpha = 1\%$

perusahaan pengguna derivatif keuangan dengan perusahaan bukan pengguna derivatif keuangan, penggunaan derivatif keuangan tidak berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak. Namun, ketika pengujian dikaitkan dengan tingkat pengungkapan dari transaksi derivatif dan perusahaan pengguna derivatif dikelompokkan menjadi pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*) dan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure level user*), penelitian ini menemukan bahwa: (1) pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*) memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah daripada perusahaan lainnya; dan (2) pengguna derivatif keuangan dengan tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang rendah (*low disclosure level user*) memiliki perilaku penghindaran pajak yang lebih agresif, yang diindikasikan dengan lebih rendahnya *effective tax rate* (GAAP ETR dan *Current ETR*) perusahaan ini, dibandingkan dengan perusahaan pengguna derivatif yang memiliki tingkat pengungkapan transaksi derivatif yang tinggi (*high disclosure level user*).

Dari temuan-temuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum di Indonesia, penggunaan derivatif keuangan tidak berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji hubungan antara tingkat penggunaan instrumen derivatif keuangan dengan tingkat penghindaran pajak. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa *net fair value of derivative* (ukuran dari tingkat penggunaan derivatif keuangan) berhubungan positif signifikan dengan tingkat penghindaran pajak.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah pentingnya mempertimbangkan tingkat pengungkapan transaksi derivatif ketika menginvestigasi apakah perusahaan pengguna derivatif memiliki perilaku pajak yang lebih agresif. Regulator pajak harus mempertimbangkan tingkat pengungkapan

transaksi derivatif dalam catatan atas laporan keuangan ketika mendeteksi apakah terjadi tindakan penghindaran pajak yang agresif pada perusahaan pengguna derivatif. Perusahaan pengguna derivatif yang cenderung menyembunyikan transaksi derivatifnya mungkin perlu lebih diperhatikan karena mereka cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan lainnya. Bagi penelitian selanjutnya, tingkat pengungkapan transaksi derivatif dari perusahaan pengguna derivatif harus selalu diperhatikan ketika melakukan pengujian terhadap jenis perusahaan ini.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sulit memastikan apakah perusahaan yang dikategorikan sebagai bukan pengguna derivatif keuangan (*matched sample*) memang benar bukan merupakan pengguna derivatif. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa perusahaan cenderung menyembunyikan transaksi derivatif ini dan sama sekali tidak mengungkapkan transaksi derivatif yang dilakukannya. Keterbatasan berikutnya terkait dengan jumlah sampel perusahaan pengguna derivatif yang relatif sedikit dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian, tidak hanya dari perusahaan yang bergerak di sektor industri nonkeuangan saja, tetapi juga meneliti perusahaan pengguna derivatif yang bergerak di sektor industri keuangan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan pula untuk mempertimbangkan dampak dari penerapan PSAK 50 dan 55 revisi terbaru yang mengacu kepada IAS 32 dan 39, karena PSAK tersebut dianggap dapat meningkatkan *value relevance* dan transparansi dari laporan keuangan sehingga tingkat pengungkapan transaksi derivatif juga akan lebih baik lagi dengan diterapkannya PSAK 50 dan 55 revisi terbaru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, W. 2009. *Asosiasi Perdagangan Berjangka Minta PP 17 Dicabut*. Diunduh tanggal 30 April 2013, <http://economy.okezone.com>.

- Ashari, N., H.C. Koh, S.L. Tan, and W.H. Wang. 1994. Factor Affecting Income Smoothing Among Listed Companies in Singapore. *Accounting Business Research*, 24, 291-301
- Balsam, S. 1998. Discretionary Accounting Choices and CEO Compensation. *Contemporary Accounting Research*, 15, 229-252.
- Barton, J. 2001. Does The Use of Financial Derivatives Affect Earnings Management Decisions? *The Accounting Review*, 76, 1-26.
- Darussalam dan D. Septriadi. 2009. *Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif: Deductible or Not?* Diunduh tanggal 20 April 2013, <http://www.ortax.org>.
- Desai, M. and D. Dharmapala. 2006. Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Donohoe, M. 2011a. *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: An Empirical Examination of New Users*. Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Donohoe, M. 2011b. *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance*. Ph.D. Dissertation, UMI Dissertation Publishing.
- Donohoe, M. 2012. *Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: Why, How, and Who?* Working paper, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- Dyregang, S.D., M. Hanlon, and E. Maydew. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Derashid, C. and H. Zhang. 2003. Effective Tax Rates and The "Industrial Policy" Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 12, 45-62.
- Gaver, J. J., K. M. Gaver, and J. R. Austin. 1995. Additional Evidence on Bonus Plans and Income Management. *Journal of Accounting and Economics*, 19, 3-28.
- Gupta, S. and K. Newberry. 1997. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rate: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16, 1-34.
- Hanlon, M. and S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Healy, P. 1985. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decision. *Journal of Accounting and Economics*, 7, 85-107
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012*. Jakarta: Divisi Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lobo, G.J. and J. Zhou. 2001. Disclosure Quality and Earnings Management. *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics*, 8, 1-20.
- Moses, O. 1987. Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using Accounting Changes. *The Accounting Review*, 62 (2), 358-377.
- Murwaningsari, E. 2011. *Hubungan Derivatif Keuangan dan Discretionary Accrual sebagai Alat Manajemen Laba serta Pengaruh terhadap Relevansi Nilai dari Laba dan Ekuitas*. Disertasi Doktoral, Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa.
- Petersen, M.A. and S. R. Thiagarajan. 2000. Risk Measurement and Hedging: With and Without Derivatives. *Financial Management*, 29, 5-30.
- Pincus, M. and S. Rajgopal. 2002. The Interaction between Accrual Management and Hedging: Evidence from Oil and Gas Firms. *The Accounting Review*, 77 (1), 127-160.
- Raskolnikov, A. 2011. *Tax Reform and The Tax Treatment of Financial Products*. Statement before the Joint Hearing of the U.S. House Committee on Ways and Means and U.S. Senate Committee on Finance.
- Scott, W. R. 2009. *Financial Accounting Theory*. 7th edition. Toronto: Prentice-Hall.
- Smith, C. W. and R. M. Stulz. 1985. The Determinants of Firms' Hedging Policies.

Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20, 39-405.

Subramanyam, K. R. 1996. The Pricing of Discretionary Accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 249-281.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Watts, R. L. and J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Weisbach, D. A. 2005. *Problems with The Taxation of Financial Instruments*. Teaching Notes. University of Chicago Law School.

Wilson, R. 2009. An Examination of Corporate Tax Shelter Participants. *The Accounting Review*, 84 (3), 969-999.

Zhang, H. 2009. Effect of Derivative Accounting Rules on Corporate Risk-Management Behavior. *Journal of Accounting and Economics*, 47 (3), 244-264.

perlindungan atas risiko fluktuasi mata uang.

- Perusahaan melakukan transaksi swap valuta asing untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari hutang jangka panjang Perusahaan dalam mata uang asing

LAMPIRAN

Searching keyword

- Sehubungan dengan saldo kewajiban dalam mata uang asing, perusahaan telah melakukan beberapa kontrak derivatif dengan pihak lain untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing
- Derivative
- Nosional/notional
- Swap
- Forward
- Futures
- Option
- Fair value hedge
- Effective portion
- Ineffective portion
- Risk management
- Call option
- Put option
- LIBOR
- SIBOR
- Perusahaan mendapat fasilitas *cross currency swap* sebesar Rp/USD... dari ... yang dapat digunakan sebagai